



MITIGASI BENCANA MELALUI PENDIDIKAN KEBENCANAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dinar Wahyuni*)

Abstrak

Penanganan bencana akan terus berlanjut sebagai konsekuensi dari kondisi geografis dan geologis Indonesia, fenomena perubahan iklim global dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selama ini upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah masih fokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pasca bencana. Tulisan ini ingin mengkaji mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal. Mitigasi dapat dimulai dengan mengubah paradigma dari tanggap darurat ke mitigasi. Selanjutnya menerapkan pendidikan kebencanaan di keluarga, kemudian sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat dari Pasal 35 huruf h UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mewajibkan sekolah terutama sekolah di wilayah risiko bencana untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Pendahuluan

Erupsi Gunung Agung yang mengeluarkan abu vulkanis mengharuskan warga di desa sekitarnya pindah dari radius berbahaya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko yang akan timbul akibat erupsi tersebut. Selain erupsi Gunung Agung, beberapa daerah di Indonesia juga dilanda bencana. Curah hujan sangat ekstrem sebagai dampak dari siklon tropis cempaka menyebabkan banjir, tanah longsor, dan

puting beliung di beberapa wilayah Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri, Pacitan, dan Ponorogo merupakan daerah yang paling terkena dampak karena berjarak paling dekat dengan siklon. Siklon ini untuk pertama kalinya berada sangat dekat dengan pesisir selatan Jawa.

Dilihat dari penyebab bencana, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan puting beliung termasuk kategori bencana

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dinar.wahyuni@dpr.go.id



alam. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur bahwa bencana dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, bencana nonalam seperti epidemi dan wabah penyakit, serta bencana sosial yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial. Selama beberapa dekade, bencana di Indonesia terus meningkat. Kerugian yang ditimbulkan akan mengakibatkan berbagai dampak. Dan tinggi rendahnya risiko dampak bencana tergantung pada kerentanan setiap komponen yang terkena dampak.

Penanganan bencana akan terus berlanjut sebagai konsekuensi dari kondisi geografis dan geologis Indonesia, fenomena perubahan iklim global dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selama ini upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah masih terfokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pascabencana. Sedangkan kegiatan prabencana termasuk mitigasi belum secara efektif dilakukan. Tulisan ini ingin mengkaji upaya mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal.

Mitigasi Bencana

Kegiatan manajemen bencana dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Kegiatan prabencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini; 2) Kegiatan saat terjadi bencana mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti pengungsian; 3) Kegiatan pascabencana yang mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

Mengingat sebagian wilayah Indonesia rentan bencana, maka kegiatan manajemen bencana perlu lebih memperhatikan kegiatan prabencana termasuk mitigasi. Tujuannya agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat terjadi bencana sehingga mengurangi risiko bencana. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada

kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana.

Mitigasi dilakukan melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat menggunakan teknik-teknik di mana mereka dapat mengorganisir diri mereka sendiri dan mampu mandiri menghadapi bencana. Penggunaan sumber-sumber daya lokal akan dimaksimalkan juga. Mitigasi yang berhasil mengandung sejumlah perubahan-perubahan fundamental pada perilaku masyarakat berisiko bencana.

Mitigasi Bencana Melalui Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal

Langkah awal yang dilakukan dalam mitigasi bencana adalah mengubah paradigma dari paradigma tanggap darurat ke paradigma mitigasi. Perubahan paradigma ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tetapi juga Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penanganan bencana. Apabila seluruh pihak terkait sudah memiliki paradigma yang sama, maka langkah selanjutnya adalah pendidikan kebencanaan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mengurangi risiko bencana. Dan hal ini bisa dimulai sejak dini dari keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak bisa memberi informasi dan pengetahuan seputar bencana pada anak sesuai dengan tingkatan usia anak. Kegiatan ini bersifat interaktif antara orang tua dan anak sehingga menjadi proses pembelajaran bersama yang menyenangkan. Selanjutnya, orang tua melakukan analisis risiko bencana seperti mengenali tanda dan ciri-ciri potensi bencana akan yang terjadi di daerahnya menggunakan kearifan lokal yang ada. Karena karakteristik bencana di setiap daerah berbeda. Pendidikan kebencanaan ini akan membentuk anak menjadi pribadi yang sadar bencana dan perilaku tangguh bencana sehingga anak mampu membuat keputusan ketika bencana terjadi.

Selain dalam keluarga, pendidikan kebencanaan juga dilakukan di sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua tingkatan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Pendidikan kebencanaan bertujuan untuk memberikan gambaran dan acuan dalam proses siaga bencana. Melalui pendidikan

ini diharapkan siswa mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat saat menghadapi bencana. Selain itu, pendidikan ini harus mampu membangun sikap empati terhadap korban bencana sehingga siswa terbiasa membantu orang lain yang membutuhkan.

Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan anak didik yang tangguh dalam menghadapi bencana. Pemahaman yang komprehensif tentang kearifan lokal yang dimiliki daerahnya akan mendukung proses pengurangan risiko bencana. Sehingga dalam konteks mitigasi pengurangan risiko bencana, adanya kurikulum berbasis kearifan lokal akan dapat menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam dan budaya. Karena masyarakat yang tangguh terhadap bencana adalah masyarakat yang menjaga dan memahami alam dan budayanya.

Pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal dapat disisipkan dalam mata pelajaran terkait. Pada pelajaran IPA misalnya, siswa akan mendapatkan pengetahuan tentang menjaga kelestarian alam. Siswa selalu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bencana mulai dari jenis-jenis bencana, penyebab, proses terjadinya sampai dampak bencana. Di samping itu, siswa diberikan pemahaman tentang kearifan lokal sehingga mempunyai pemahaman akan hubungan antara manusia dan alam. Diharapkan siswa mempunyai kesadaran untuk menjaga alam yang ditempatinya sehingga mengurangi risiko bencana. Sedangkan pada pelajaran kewarganegaraan, siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan bermasyarakat terutama saat bencana. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa empati terhadap korban bencana sehingga pada saat terjadi bencana, siswa mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk membantu sesama.

Mengingat Indonesia mempunyai potensi besar dalam bencana, maka sekolah tidak sekedar memberikan pengetahuan saja, tetapi perlu pelatihan agar siswa siap tanggap dalam menyikapi bencana. Sekolah dapat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pelatihan mitigasi bencana. PMI dan BPBD dapat melakukan kajian dan analisis bersama siswa, merumuskan rencana untuk peningkatan ketangguhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing daerah. Pelatihan mitigasi bencana

perlu terus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah.

Pasal 35 huruf g UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tetapi prosedur tentang pendidikan dan pelatihan ini tidak diatur dengan jelas dan rinci. Akibatnya, sekolah-sekolah tidak merasa wajib untuk memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah.

Kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam upaya pengurangan risiko bencana di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana. Kearifan lokal dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan. Kearifan lokal dapat diadaptasi komunitas lain dengan karakteristik sama yang menghadapi situasi serupa. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana longsor terlihat dalam tradisi pemilihan lahan ladang. Tradisi Baduy mengajarkan bahwa dalam perladangan dilarang menggunakan peralatan pacul apalagi bajak, membuat petak sawah atau menanam lahan dengan tanaman untuk perdagangan. Dengan adanya larangan tersebut maka permukaan tanah tidak akan berubah dan tanah tidak akan terbolak-balik. Perubahan permukaan tanah diyakini akan berdampak pada ketidakstabilan permukaan tanah dan dapat mengakibatkan tanah longsor.

Masyarakat Baduy juga mempunyai aturan adat atau *pikukuh* dalam mendirikan rumah. Apabila akan mendirikan rumah pada tanah miring maka tidak boleh meratakan tanah tersebut. Meratakan tanah akan merusak tanah. Untuk memperoleh lantai rumah yang rata, maka tiang rumah diatur ketinggiannya. Dengan demikian, air hujan akan mengalir mengikuti jalan alamiahnya. *Pikukuh* membuat pemukiman masyarakat Baduy tidak pernah dilanda tanah longsor atau banjir.

Selain Baduy, masyarakat Simeulue mempunyai sistem peringatan dini yang dikenal dengan istilah *smong*. *Smong* menjadi instrumen penting dalam mengurangi korban jiwa pada saat tsunami 2004 lalu. *Smong* diwariskan secara turun temurun melalui dongeng dan budaya bertutur oleh tokoh masyarakat setempat. T tutur cerita *smong* didendangkan dalam bentuk syair yang berisikan gejala-gejala alam yang

bisa mendatangkan tsunami dan ajakan untuk lari ke tempat yang lebih tinggi jika ada guncangan tanah yang kuat. Syair ini didengarkan untuk mengantar tidur anak sehingga tertanam kuat sejak masih kecil. Pemerintah Simeulue memberikan dukungan formal dengan mengeluarkan Qanun No. 30 Tahun 2003. Peringatan dini *smong* menjadi perilaku berkekuatan hukum bagi masyarakat Simeulue.

Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Baduy dan Simeulue menjadi upaya mitigasi bencana bagi masyarakat setempat. Pesan budaya yang terbentuk sebagai hasil adaptasi sekelompok manusia dengan lingkungannya kemudian diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sistem kepercayaan masyarakat tersebut terbukti membantu menciptakan sikap budaya bersama dan pada gilirannya akan membantu masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda. Walaupun istilah dan cara-cara yang digunakan berbeda, namun semua dapat dijadikan potensi dalam membangun mitigasi bencana. Kearifan lokal lebih efektif dalam membentuk kesadaran tentang kebencanaan karena bersumber dari budaya yang ada di masyarakat. Karena itu kegiatan mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal perlu dikembangkan. Dalam hal ini, mitigasi dibangun bukan hanya sebagai sistem peringatan dini tetapi menjadi sebuah budaya dalam perilaku masyarakat. Karena bencana merupakan bagian yang integral dari kehidupan masyarakat.

Penutup

Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan bencana. Namun, selama ini penanganan bencana masih fokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Tahap prabencana termasuk di dalamnya mitigasi belum cukup efektif dilakukan. Mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini dan secara kontinyu. Bisa dimulai dari keluarga dengan memberi informasi dan pengetahuan seputar bencana pada anak sesuai dengan tingkatan usia anak. Selain dalam keluarga, pendidikan kebencanaan juga dilakukan di sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua

tingkatan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana.

Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan anak didik yang tangguh dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal merupakan pelajaran yang komprehensif dalam mendeteksi bencana di sebuah daerah. Melalui kearifan lokal, kita lebih mengenal bencana yang sering terjadi di daerah sekitar.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat Pasal 35 huruf h UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mewajibkan sekolah terutama sekolah yang berada di daerah rawan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Referensi

- “Alam Berkembang Ibarat Guru: Kearifan Lokal Membaca Bencana”, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/JCfMuqzn1339044903.pdf>, diakses 6 Desember 2017.
- “Banjir di Pacitan dan Yogyakarta, Dampak Keserakahan Pada Alam Dengan Kerugian Triliunan Rupiah”, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42163588>, diakses 5 Desember 2017.
- Mirza Desfandi. Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 2 Des 2014: 191-198.
- “Menanti Regulasi Pendidikan Kebencanaan”, <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/26/menanti-regulasi-pendidikan-kebencanaan>, diakses 6 Desember 2017.
- “Mitigasi Berbasis Masyarakat”, <http://www.mitigasi-bencana.com/?p=58>, diakses 8 Desember 2017.
- “Pendidikan Siaga Bencana Dalam Keluarga”, <https://news.detik.com/kolom/d-3502328/pendidikan-siaga-bencana-dalam-keluarga>, diakses 6 Desember 2017.
- Suparmini, Sriadi Setyawati, Dyah Respati Suryo Sumunar. (2013). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.